
OPTIMALISASI PANGKALAN TNI AL NABIRE GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN LAUT DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM RANGKA Mendukung Tugas TNI AL

Hantoro, S.H.¹, DR. Hermanto, S.E., M.M.², Sri Hastuti.³

Strategi Operasi Laut, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: ¹hantoros@gmail.com, ²hermanto@seskoal.ac.id, ³hastuti2707@gmail.com

Abstrak

Lanal Nabire berkedudukan di Provinsi Papua Tengah, yang merupakan Provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2022. Dengan terbentuknya Provinsi baru Papua Tengah maka tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan laut dan tugas-tugas TNI AL lainnya semakin meningkat. Untuk melaksanakan tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional di wilayah tersebut, diperlukan peningkatan peran Lanal Nabire. Namun demikian ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan tugas menjaga keamanan laut Papua Tengah tidak terlaksana secara optimal. Penulisan Kertas Karya Perorangan ini bertujuan untuk memberikan pembahasan dan pemecahan atas masalah yang ditemukan guna mewujudkan kondisi yang diharapkan melalui perumusan Kebijakan, Strategi dan Upaya, sehingga dapat dipetakan subyek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan optimalisasi Lanal Nabire guna meningkatkan keamanan laut di Papua Tengah, melalui berbagai metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif murni, dengan observasi penulis selama bertugas di wilayah Papua untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara mengamati dan berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait data lain yang diperlukan. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka terhadap berbagai referensi yang relevan dengan topik penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang mengakibatkan peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire dalam menjaga keamanan laut belum terselenggara secara optimal meliputi validasi organisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), sinergitas dengan aparat dan instansi lain, serta dukungan publik terhadap Lanal Nabire. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar kebijakan, strategi yang diterapkan dalam upaya optimalisasi berfokus pada bidang-bidang tersebut.

Kata kunci: Pangkalan TNI AL, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Dukungan Publik, Validasi organisasi Lanal Tipe C.

Abstract

Nabire naval base is situated in Central Papua, which is a new Province that has just been formed in the year of 2022. The establishment of this province has brought some consequences for Nabire naval base. to intensify its tasks and responsibilities in term of maritime security and other tasks with regard to Indonesian Navy. In order to administer tasks in the law enforcement and safeguard maritime security of national jurisdiction sea teritory in that area, the role of Nabire Naval Base has to be strenghtened. However, severa/ issues have been stand in the way that lead to the tasks in safeguarding maritime security could not be carried on optimally. This writing seek to elucidates and offer some alternatives as problem solving in order to achieve the expected condition through policy formulation, strategy and efforts that could determine the responsible subject to bring about optimum role of Nabire Naval Base in improving maritime security in the province of Central Papua by using various methods.

This writing applies pure qualitative methodological approach, using an observation technique by the writer during his experience in Papua to obtain required data and information. It was carried by observing as well as interacting the object directly and indirectly. In addition, the writers also reviewing some references that have relevances to th topic of this writing. The result indicates that several problems that have negatively affected the role of Nabire Naval Base in safeguarding maritime security are validation of organization, the limitedness of facilities, human resources, infirm synergy with other stakeholders in maritime security as well as poor public support for Nabire Naval Base. Consequently, writer recommends several strategies to optimize the role of Nabire Naval Base should be applied in that matters.

Keywords: Naval Base, role, human resource, faci/i/es, public support, validation of organization

1. PENDAHULUAN

a. Umum.

Tugas pokok TNI Angkatan Laut (TNI AL) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara TNI AL juga melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, TNI AL mengimplementasikannya melalui suatu sistem yang tergabung dalam suatu kesatuan yang disebut dengan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Sistem ini terdiri dari komponen kekuatan armada kapal perang, pasukan marinir, pesawat udara, dan pangkalan TNI AL. Tiap-tiap komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan karakteristik peran dan fungsinya memberikan dukungan demi terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas TNI AL di seluruh wilayah NKRI, termasuk di wilayah provinsi Papua Tengah,

dimana TNI AL sudah menunjukkan eksistensi melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Nabire.

Provinsi Papua Tengah merupakan Provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2022, dengan tujuan mengakomodir aspirasi masyarakat Papua guna mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua yang berada di wilayah Papua Tengah. TNI AL dihadapkan dengan tantangan antara lain bahwa wilayah tersebut merupakan jalur utama masuknya munisi dan senjata api ilegal di Papua. Hal ini terjadi karena Nabire merupakan daerah transit dan sumber distribusi logistik bagi lima Kabupaten yang ada di wilayah Papua Tengah, yaitu Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika. Pada tanggal 4 Januari 2021 Polda Papua melakukan penangkapan terhadap Naftali Tipagau dan Paulus Tebay yang merupakan anggota KNPB Intan Jaya sekaligus pencari senjata dan amunisi untuk KKB Intan Jaya. Kemudian pada tanggal 6 November 2021 terungkap kasus penjualan senjata api dari Filipina ke Papua yang dipastikan untuk memasok senjata bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di Intan Jaya. Kapolda Papua bahkan menyatakan bahwa walapun sudah sering terjadi pengungkapan seperti itu, tetapi penjualan senjata dan amunisi masih terus terjadi melalui jalur laut Nabire sejak awal tahun 2020 hingga kini. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan laut di wilayah Papua Tengah belum terjaga dengan baik, oleh karena diharapkan peran TNI AL

melalui Lanal Nabire untuk meningkatkan kondisi keamanan laut di wilayah tersebut. Dengan terbentuknya provinsi baru Papua Tengah maka tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan laut dan tugas-tugas TNI AL lainnya semakin meningkat. Untuk melaksanakan tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional di wilayah tersebut, diperlukan peningkatan peran Lanal Nabire guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peran dan fungsi, serta optimalisasi kinerja dan tugas TNI AL serta TNI di wilayah Papua Tengah. Namun demikian ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan tugas menjaga keamanan laut Papua Tengah tidak terlaksana secara optimal, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), sinergitas dengan aparat dan instansi lain, serta status Lanal Nabire dalam organisasi TNI AL.

2. METODE DAN PENDEKATAN

Metodologi penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Metode penulisan deskriptif analisis dengan pendekatan komprehensif integral dengan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang ada, lalu dianalisa dan dirumuskan dalam upaya pemecahan permasalahan, dan dimana penelitian cenderung menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari buku,

makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi yang diterbitkan maupun dari sumber lain yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Laut yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan nasional, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut agar berjalan dengan baik, maka perlu adanya dukungan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang cukup memadai dari segi pelayanan dan dukungan logistik, serta kemampuan melaksanakan patroli keamanan laut terbatas maupun pengakan hukum di wilayah kerjanya. Untuk itu diperlukan dukungan kemampuan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Sinergitas dengan instansi terkait serta dukungan dari masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas tersebut, yang pada Bab tiga ini akan dijelaskan oleh penulis tentang bagaimana situasi dan kondisi saat ini untuk memberikan gambaran secara singkat sebagai bahan untuk menentukan kebijakan, strategi, dan upaya yang dapat

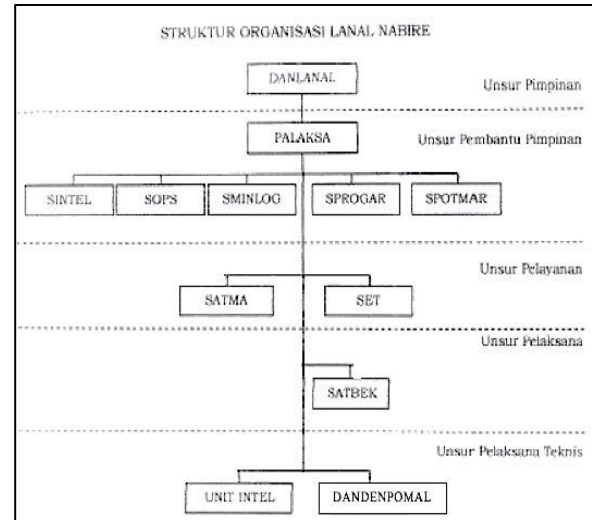
ditempuh dalam rangka memecahkan persoalan yang ada.

- Kondisi Pangkalan TNI AL Nabire Saat ini:

Dalam melaksanakan perannya untuk mewujudkan keamanan laut di wilayah wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah, kemampuan dan kesiapan Lanal Nabire dapat dinilai dari beberapa bidang, terutama meliputi bidang Validasi Organisasi, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Sinergitas dengan instansi terkait serta dukungan dari masyarakat setempat.

- Validasi Organisasi Lanal Nabire menjadi Lanal Tipe C.

Saat ini Pangkalan TNI AL Nabire merupakan Pangkalan TNI AL yang tergolong dalam kelas Pangkalan Tipe D. Pangkalan TNI AL tipe ini dipimpin oleh Komandan Pangkalan berpangkat Mayor yang berdasarkan DSP tahun 2021 membawahi beberapa perwira staf dan personel sejumlah 40 orang. Walaupun demikian saat ini Lanal Nabire hanya diperkuat oleh personel sejumlah 12 orang yang bahkan untuk Lanal Tipe D belum memenuhi jumlah personel yang dibutuhkan untuk mengawaki satuan, demikian juga dengan kebutuhan sarana dan prasarana. Adapun struktur organisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire saat ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Struktur Organisasi Lanal Nabire

- Sarana dan Prasarana

Pangkalan TNI AL Nabire terletak di Kabupaten Nabire di kawasan teluk Cendrawasih Provinsi Papua Tengah. Sebagai Lanal yang belum lama berubah status dari Pos TNI AL (Posal) menjadi Lanal tipe D, Lanal Nabire memiliki sarana prasarana antara lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

NO	SARPRAS	JUM	KET
1	Gedung Mako Lanal Nabire	1 unit	117 m ² / 2 lantai
2	Tanah	1 unit	1.450 m ²
3	Perumahan	5 unit	Tipe 29
4	Gudang	2 unit	Gudang Senjata & Bekca
5	Kendaraan Bermotor roda 4	2 unit	Randis Komandan dan Randis operasional

6	Kendaraan Bermotor roda 2	2 unit	Motor Operasional dan caraka
7	Alpung	1 unit	Perahu karet dengan motor tempel
8	Senjata Laras Panjang	8 pucuk	M-16A
9	Senjata Laras Pendek	4 pucuk	1 pucuk G1, 1 pucuk Walther PPK dan 2 pucuk FN
10	Alat Selam	3 set	

Sarana Prasarana Pokok yang dimiliki Lanal Nabire

Sebagai Lanal yang belum lama berubah status dari Pos TNI AL (Posal) menjadi Lanal tipe D, struktur jabatan dan Daftar Susunan Personel (DSP) Lanal Nabire perlu diadakan penyesuaian dengan statusnya sebagai Lanal tipe D. Daftar susunan personel Lanal Nabire saat ini adalah pada tabel sebagai berikut.

NO	GOLONGAN PANGKAT	JUMLAH
1	Perwira	13 orang
3	Tamtama	8 orang
4	PNS	2 orang
	Jumlah	40 orang

Daftar Susunan Personel Lanal Nabire (DSP 2021)

Saat ini jumlah personel riil di Lanal Nabire masih sesuai dengan kondisi pada saat statusnya adalah Posal sehingga belum terisi sesuai dengan DSP tahun 2021 tersebut,

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3 sebagai berikut ini.

NO	GOLONGAN PANGKAT	JUMLAH	% DSP
1	Perwira	3 orang	23%
2	Bintara	4 orang	23,5%
3	Tamtama	5 orang	62,5%
4	PNS	-	0%
	Jumlah	12 orang	30%

Jumlah Personel Riil Lanal Nabire

Kabupaten Nabire memiliki lima pelabuhan laut yang terdiri dari satu pelabuhan perintis dan empat pelabuhan lokal, seperti pada tabel berikut.

NO	PELA BUHAN	JENIS	KETERANGAN
1	Nabire	Perintis	digunakan untuk angkutan laut
2	Kwatisore	Pelabuhan Lokal	digunakan nelayan
3	Napan	Pelabuhan Lokal	digunakan nelayan
4	P. Mambor	Pelabuhan Lokal	digunakan nelayan
5	P. Moor	Pelabuhan Lokal	digunakan nelayan

Wilayah Indonesia bagian timur memiliki sumber daya alam baik yang sangat berlimpah berupa pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata, namun hingga tujuh dekade kemerdekaan Indonesia, wilayah bagian timur kondisinya lebih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia dalam berbagai bidang, meliputi perekonomian, sumber daya manusia, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Potensi sumber daya yang begitu besar masih belum bisa menyentuh langsung dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan secara umum bagi masyarakat di wilayah Indonesia timur. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kemiskinan Indonesia masih terpusat di Indonesia Timur dengan prosentase kemiskinan 21,23%, terutama di Maluku dan Papua. Hal itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang juga memprihatinkan, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya *Human Development Index* (Indikator pencapaian rata-rata warga dalam suatu negara yang diukur antara lain melalui kesehatan, harapan hidup, pendidikan dan standar hidup) pada wilayah tersebut, yang hanya senilai 57,25 dibandingkan dengan rata-rata nasional yang memiliki nilai 69,55, menurut data BPS.

Dalam rangka mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan optimalisasi peran Pangkalan TNI AL guna meningkatkan keamanan laut di wilayah Papua, maka perlu dipahami terlebih dahulu faktor eksternal dan faktor internal yang berpengaruh. Faktor

eksternal adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi penyelenggaraan keamanan laut di wilayah Lanal Nabire. Sementara Faktor internal adalah faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi penyelenggaraan keamanan laut di wilayah Lanal Nabire. Pembahasan faktor-faktor ini dilaksanakan dengan berfokus pada bidang-bidang seperti politik, ekonomi, sosial, militer dan sebagainya.

Dalam rangka melaksanakan peran secara optimal untuk mewujudkan keamanan laut di wilayah wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dan mendukung tugas TNI AL, perlu adanya peningkatan kemampuan dan kesiapan Lanal Nabire dalam beberapa bidang, meliputi bidang Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Sinergitas dengan instansi terkait serta dukungan publik. Untuk itu perlu diketahui kondisi yang dikehendaki guna mewujudkan terselenggaranya peran Lanal Nabire guna mewujudkan keamanan laut di wilayah wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dan mendukung tugas TNI AL.

- a. Validasi Organisasi Lanal Nabire Dinamika perkembangan lingkungan strategis menuntut TNI perlu menyesuaikan organisasinya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Penyempurnaan organisasi TNI dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas yang dihadapi, sehingga tugas pokok TNI dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

tugas, peran dan fungsi, serta optimalisasi kinerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut guna mendukung Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia, perlu adanya Peningkatan status Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kelas D Nabire menjadi Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kelas C Nabire melalui validasi organisasi. Validasi adalah proses penyempurnaan organisasi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk lebih memaksimalkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mengawaki organisasi yang mampu melaksanakan peran Lanal secara optimal sesuai dengan yang diharapkan, guna meningkatkan keamanan laut dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI AL diperlukan terpenuhinya kebutuhan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam konteks peningkatan fungsi keamanan laut, pemenuhan kualitas dapat dilaksanakan dengan peningkatan kompetensi personel pengawak sarana operasi keamanan laut berupa *combat boat*, *sea rider* maupun perahu karet, yang masing-masing memerlukan keterampilan dan keahlian khusus dalam pengoperasian maupun pemeliharaan dan perawatannya. Selain itu diperlukan juga kompetensi dalam hal pengoperasian sarana dan prasarana pendukung lainnya berupa alat material khusus seperti alat deteksi, alat komunikasi serta

peralatan monitoring pendukung terutama radar, *mobile GPS* dan lain-lain.

Keberhasilan dalam mencapai kondisi yang diharapkan dalam optimalisasi peran Lanal Nabire guna meningkatkan kemanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL dapat diindikasikan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terwujudnya validasi organisasi Lanal Nabire menjadi Lanal tipe C untuk mengoptimalkan peran Lanal Nabire guna meningkatkan kemanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL.
- b. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana di Lanal Nabire untuk mengoptimalkan peran Lanal Nabire guna meningkatkan kemanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL.
- c. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Lanal Nabire untuk mengoptimalkan peran Lanal Nabire guna meningkatkan kemanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL.
- d. Terwujudnya sinergitas Lanal Nabire dengan *stakeholder* kemaritiman lain untuk mengoptimalkan peran Lanal Nabire guna meningkatkan kemanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL.

- e. Terwujudnya dukungan publik bagi Lanal Nabire untuk mengoptimalkan peran Lanal Nabire guna meningkatkan keamanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL.

Optimalisasi peran Lanal Nabire guna meningkatkan keamanan laut di wilayah provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL merupakan suatu proses memperbaiki kondisi saat ini dengan segala permasalahan yang ditemukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang disusun secara konseptual, komprehensif dan integral, serta memiliki sasaran sebagai pedoman untuk dicapai. Sasaran dari kebijakan dapat dicapai melalui rumusan beberapa strategi yang memiliki metoda, sarana, dan tujuan. Berdasarkan strategi-strategi tersebut, selanjutnya disusun upaya-upaya untuk mencapai kondisi yang diharapkan melalui validasi organisasi Lanal Nabire menjadi Lanal tipe C, pemenuhan sarana dan prasarana keamanan laut di Lanal Nabire, pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Lanal Nabire, mewujudkan sinergitas antara Lanal Nabire dengan *stakeholder* kemaritiman dan keamanan laut lainnya serta dengan mewujudkan dukungan publik bagi Lanal Nabire untuk mengoptimalkan peran Lanal Nabire guna meningkatkan keamanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL.

Untuk mewujudkan optimalisasi Lanal Nabire guna meningkatkan keamanan laut di wilayah provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI AL, perlu disusun suatu kebijakan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Kebijakan tersebut adalah:

Terwujudnya optimalisasi Lanal Nabire melalui terlaksananya validasi organisasi Lanal Nabire menjadi Lanal tipe C, terpenuhinya sarana dan prasarana keamanan laut di Lanal Nabire, terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia di Lanal Nabire, terwujudnya sinergitas antara Lanal Nabire dengan *stakeholder* kemaritiman dan keamanan laut lainnya serta dengan terwujudnya dukungan publik bagi Lanal Nabire guna meningkatkan keamanan laut di wilayah Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

4. KESIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan mengenai optimalisasi peran Lanal Nabire guna keamanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Saat ini Lanal Nabire merupakan Pangkalan Tipe D dengan jumlah personel dan Sarana Prasarana minim, tidak sebanding dengan tuntutan tugas mengamankan perairan Nabire Provinsi Papua Tengah. Selain itu kedudukannya tidak berimbang dengan Provinsi Papua

Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru. Untuk itu diperlukan validasi organisasi menjadi Lanal dengan tipe lebih tinggi untuk merespon tuntutan tugas serta pengaruh pemekaran provinsi, sebagaimana juga dilakukan oleh TNI AD yang telah membentuk Kodim Nabire di wilayah tersebut.

- b. Sarana prasarana Lanal Nabire saat ini masih terbatas untuk melaksanakan peran dalam menjaga keamanan laut sehingga diperlukan optimalisasi berupa pengadaan *combat boat*, *sea rider* dan sarana prasarana pendukung meliputi sarana prasarana dukungan logistik, perawatan personel dan pengawasan laut. Hal ini diharapkan mendukung terwujudnya peran Lanal Nabire secara optimal guna meningkatkan keamanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia masih menjadi kendala dalam menjalankan peran secara optimal untuk meningkatkan keamanan laut perairan Nabire, Papua Tengah. Oleh sebab itu perlu penambahan personel sesuai DSP Lanal Tipe C agar seluruh jabatan, tugas dan fungsi dapat diawaki oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk itu perlu adanya pendidikan dan

latihan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi personel demi mendukung terwujudnya peran Lanal Nabire secara optimal guna meningkatkan keamanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

- d. Sinergitas dengan *stakeholder* kemaritiman dan keamanan laut belum terwujud secara optimal karena status Lanal Nabire yang belum sebanding. Peningkatan status Lanal diharapkan mendukung terjalinnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama untuk mewujudkan sinergitas dengan *stakeholder* kemaritiman dan keamanan laut di wilayah Nabire demi mendukung terwujudnya peran Lanal Nabire secara optimal guna meningkatkan keamanan laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- e. Dukungan publik merupakan salah satu elemen *sea power* yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Lanal Nabire dalam mewujudkan keamanan laut perairan Papua Tengah. Oleh sebab itu diperlukan dukungan publik berupa dukungan masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana laut dan udara untuk mendukung terwujudnya peran Lanal Nabire secara optimal guna meningkatkan keamanan

laut di wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

5. REFERENSI

A. Buku dan Barang Cetakan

- Agus Adriyanto. Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap Dalam Pembinaan Potensi Maritim Guna Menghadapi Imigran Gelap. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, Volume 3 Nomor 3, Desember 2017.
- Bagus, Thomas. Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 5 Nomor 2, Juni 2016
- Dian Ari Nugroho dalam buku Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba 2017
- Hotniar Siringoringo. Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Iksan Burhanudin, Chairul. Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makasar, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020
- Kasworo, Yerrico. Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut Yang Berdaulat dan Berkelanjutan. Jurnal Rechtsvinding Vol 8, No.2, Agustus 2019

Ken Booth, Navies and Foreign Policy, London: Croom Helm, 1977

Kuncoro Arry Prasetyo. Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim. Jurnal Strategi Pertahanan Laut | Volume 5 Nomor 1, 2019

Manahan Budiarto Pandjaitan. Peran Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bangka Belitung Dalam Mendukung Operasi Keamanan Laut di ALKI I. Jurnal Pertahanan & Bela Negara ,Volume 9 Nomor 3, Desember 2019.

Marsetio, Sea Power Indonesia. Jakarta:Universitas Pertahanan, 2014

Sarlito Wirawan, Teori Psikologi social, Jakarta:Rajawali Pers, 2010

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi khusus Papua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

C. Sumber Internet

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/06/13060271/nabire-jadi-jalur-penyelundupan-senjata-kkb-ini-penjelasan-kapolres#>

060271/nabire-jadi-jalur-penyelundupan-senjata-kkb-ini-penjelasan-kapolres#

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/05/18034921/dpo-pencari-senjata-dan-amunisi-untuk-kkb-ditangkap-di-jayapura#>

034921/dpo-pencari-senjata-dan-amunisi-untuk-kkb-ditangkap-di-jayapura#

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur>

bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur

<https://www.beritasatu.com/nasional/393388/pendidikan-masih-jadi-masalah-utama-di-papua>

didikan-masih-jadi-masalah-utama-di-papua

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021021202123724-20/benny-wenda-deklarasi-merdeka-dan-klaim-konstitusi-sendiri>

02123724-20/benny-wenda-deklarasi-merdeka-dan-klaim-konstitusi-sendiri

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210217111225-4-223934/menko-perekonomian-apresiasi-dukungan-tni-untuk-ppkm-mikro>

111225-4-223934/menko-perekonomian-apresiasi-dukungan-tni-untuk-ppkm-mikro

<https://suarapapua.com/2020/07/17/otsus-atau-referendum-isu-politik-papua-saat-ini/>

referendum-isu-politik-papua-saat-ini/

<https://news.detik.com/berita/kekejaman-kkb-bunuh-pekerja-trans-papua-di-nduga>

bunuh-pekerja-trans-papua-di-nduga

<https://news.detik.com/berita/baku-tembak-dengan-tni-di-papua--anggota-kksb-diperkirakan-tewas>

dengan-tni-di-papua--anggota-kksb-diperkirakan-tewas

<https://nasional.tempo.co/read/1709566/kronologi-lengkap-kasus-penyanderaan-pilot-susi-air-nyaris-2-bulan-belum-dibebaskan>

gi-lengkap-kasus-penyanderaan-pilot-susi-air-nyaris-2-bulan-belum-dibebaskan

Andrew Forbes, The Naval Contribution to National Security and Prosperity, Desember 2012,

<https://www.navy.gov.au/sites/default/files/documents/SP12.pdf>

default/files/documents/SP12.pdf